BENDERA MERAH PUTIH DALAM *ARAREM*

(Studi Sosiologis Tentang Makna Simbolik Bendera Merah Putih dalam Upacara Pembayaran Maskawin pada Masyarakat Desa Ambroben, Distrik Biak Kota)

Oleh:

Harto Bernabas Berty Sawen[1], Pamerdi Giri Wiloso[2], dan Elly E. Kudubun[3]

ABSTRACT

Ararem is a Papuan identity (Ambroben, Biak), meaning of payment process of a dowry. Ararem in the practice "requires" the family and relatives of men marching procession accompanied by dancing and singing usher in dowry to the family home women who want to marry. In this ceremony one of the conditions is the use of Red and White Flag, a symbol of Indonesian national identity. This reality becomes problematic because ararem is not a state ceremony.

Some of the findings in this study are: a). the flag is interpreted as a "rubber stamp" function validate dowry delivered by the male to the female; b). Meaningful giver "message" that the dowry was ready paid. So, depth meaning as "means of exchange" and mark the handover of dowry; c). Meaningful appreciation and respect for the new identity, which became Indonesia; d). Meaningful expression of fear and self defense; e) meaningful protection and security. The use of the flag is influenced by several factors, namely: a). Tradition; b). Fear and self-defense; and c). Protection and security.

Key words: *Red White flag, simbolic, identity, Dowry , Ararem , Ambroben , integration of Papua into Indonesia*

[1] Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom), Program Studi Sosiologi, Universitas Kristen Satya Wacana, 2016.
[2] Staff pengajar Fiskom UKSW
[3] Staff pengajar Fiskom UKSW

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks Indonesia, perkawinan dimaknai sebagai pernikahan seorang laki laki dan seorang perempuan yang berjanji sebagai suami istri. Hornby, mengatakan *marriage is the union of two persons as husband and wife* (Walgito, 2002:11). Ini berarti perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri. Prosesi perkawinan memiliki tata cara yang bervariasi sesuai tradisi dalam masyarakat, begitu juga setiap masyarakat memiliki cara tersendiri untuk memaknai mas kawin. Namun demikian, ada satu persamaan dalam memahaminya bahwa mas kawin selalu memiliki arti secara material dan immaterial. Seseorang yang memiliki inisiatif untuk melaksanakan perkawinan, setidaknya memenuhi syarat: (1) mas kawin (*bride-price)*; (2) pencurahan tenaga untuk kawin atau (*bride-service)*; dan (3) pertukaran gadis (*bride-exschange*) (Koentjaraningrat, 1980 : 94).

Araren adalah pesta penyerahan mas kawin di Biak, Papua. Hal menarik dalam proses ini adalah: 1). Formasi atau barisan para pengantar maskawin yang dibentuk dalam tiga kelompok. Barisan pengantar *ararem* tersebut, diantanya: *pertama,* kelompok kelurga inti (yang dituakan) terdiri dari para perempuan atau ibu-ibu dengan busana adat Biak, membawa piring besar atau piring tua berukuran besar (*ben be pon*); *kedua,* adalah kelompok campuran (laki laki dan perempuan) yang membawa bebera maskawin lainnya sebagai pelengkap maskawin utama–perannya sebagai pengantar atau pendamping kelompok pertama; dan *ketiga,* adalah kelompok musik, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan–peran mereka adalah memainkan jenis musik daerah diiringi dengan tari-tarian–*Yosim Pancar* (*yospan*), dan 2). Penggunaan simbol bendera Merah Putih dalam arak-arakan itu. Berdasarkan amatan yang pernah peneliti lakukan, juga keterlibatan peneliti dalam satu satu upacara *ararem*, bendera Merah Putih yang dibawa akan diserahterimakan kepada pihak keluarga perempuan, kemudian terjadi penandatanganan berita acara pembayaran maskawin.

Upacara perkawinan merupakan acara mempersatukan seorang perempuan dengan sorang laki laki yang saling mencintai guna membina rumah tangga, dan ritual ini merupakan sebuah ritual adat yang jika ditelisik lebih jauh tidak memiliki keterkaitan dengan simbol-simbol negara atau dengan kata lain, upacara perkawinan bukan merupakan bagian dari upacara kenegaraan yang menuntut "hadirnya" simbol negara. Kedua insan yang bersumpah untuk hidup bersama, merupakan bentuk sumpah pribadi untuk mengikat tali percintaan mereka, dan jika diperluas, sumpah itu juga berlaku bagi keluarga kedua belah pihak mewujudkan solidaritas kekeluargaan. Ini tentu bukan sumpah untuk menduduki jabatan tertentu dalam negara Indonesia, sehingga mengharuskan adanya simbol negara seperti bendera Merah Putih. Konteks inilah yang bagi peneliti menarik untuk dikaji sebagai masalah penelitian.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1). Apa makna bendera Merah Putih dalam upacara *ararem* pada masyarakat Ambroben distrik Biak Kota? 2). Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penggunaan bendera Merah Putih dalam upacara *ararem* di masyarakat Ambroben?. Dengan demikian, maka tujuan penelitian ini adalah: 1). Mendeskripsikan makna bendera Merah Putih dalam upacara *ararem* pada masyarakat Ambroben, Biak*;* 2). Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bendera Merah Putih dalam upacara *ararem.*

2. KAJIAN TEORITIS

Makna Bendera Merah Putih: Identitas Nasional

Setiap makhluk hidup di dunia ini pasti memiliki identitas atau ciri khas. Selain berfungsi sebagai penjelas dari kepribadian seseorang, identitas atau jati diri juga berfungsi sebagai pembeda antara satu dan yang lain. Begitu pula

negara membutuhkan identitas nasional. Identitas nasional adalah ungkapan nilai-nilai budaya atau karakter suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakannya dengan bangsa lain. Karakter bangsa mengkonfirmasi perilaku yang mengandung *core values* dan nilai-nilai yang berakar pada filosofi Pancasila, dan simbol-simbol keindonesiaan seperti: Sang Saka Merah Putih, semboyan Bhineka Tunggal Ika, lambang Garuda Pancasila, dan Lagu Indonesia Raya (Ubaedillah, 2013).

Berdasarkan pasal 35 UUD 1945, dirumuskan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam pasal 9 Ayat 1 UU No. 24 secara mengatur tentang tempat bendera negara wajib dikibarkan, diantaranya seperti istana Presiden dan Wakil Presiden, kantor atau gedung lembaga pemerintah, rumah pejabat negara, pos perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia, lingkungan TNI dan Kepolisian, dan makam pahlawan nasional. Selanjutnya Pasal 12 UU No. 24/2009 mengatur bahwa "bendera negara dapat digunakan sebagai tanda perdamaian, tanda berkabung, dan penutup peti jenazah Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, anggota lembaga negara, menteri, kepala daerah, anggota DPRD, kepala perwakilan diplomatik, anggota TNI, dan anggota Kepolisian RI.

Memperhatikan makna bendera Merah Putih, pertanyaannya adalah apa relevansi penggunaan bendera Merah Putih dalam upacara penyerahan maskawin (*ararem*) pada suku Biak Numfor di Papua?. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, Papua (Barat) belum termasuk dalam kemerdekaan Indonesia itu, "dia" masih dipertahankan oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Dan lewat Komisi PBB untuk urusan Indonesia akhirnya menyepakati *Piagam Penyerahan Kedaulatan,* yang berisi 2 Pasal saja (Siregar, 2004: 35) yang bunyi Pasal 2 adalah :

"Belanda tidak menyerahkan Keresidenan Papua (Niuew Guinea) kepada Indonesia tetapi masih di bawah kekuasaan kerajaan Belanda sampai akan dibicarakan kembali setahun kemudian pada tahun berikutnya.

Akibat ketegangan yang berlangsung sangat cepat antara pemerintah Belanda dengan Indonesia maka Gubernur Belanda di Papua merasa perlu membentuk suatu Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang, komite ini kemudian dilengkapi 70 putra Papua yang berpendidikan dan berhasil melahirkan manifesto (Siregar, 2004: 35) :

1. Menentukan nama negara: Papua Barat
2. Menentukan lagu kebangsaan: Hai Tanahku Papua
3. Menentukan bendera: Bintang Kejora
4. Menentukan bahwa bendera Bintang Kejora dikibarkan pada tanggal 1 November 1961[4].

Upaya politik terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia akhirnya melahirkan: *New York Agreement* tanggal 15 Agustus 1962, dan *Roma Agreement* 30 September 1962. Implikasinya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 di Papua Barat. Latifah Anum Siregar (2004) maupun Socrates Sofyan Yoman (2015) menggambarkan selama proses penyelesaian sengketa atas Papua Barat tersebut rakyat Papua berada dalam posisi pasif–tidak dilibatkan. Faktanya proses masuknya Papua Barat ke Indonesia lewat PEPERA 1969 sampai dengan saat ini masih diperdebatkan karena tidak mengindahkan perjanjian New York, yakni *one man one vote* berubah menjadi *one delegation*

[4] Namun tanggal 1 November tersebut Bendera Bintang Kejora tidak dikibarkan karena masih menunggu persetujuan pemerintah Bendanda di Belanda. Setelah persetujuan diberikan maka bendera Bintang Kejora dikibarkan Tanggal 1 Desember 1961 di Jayapura sekaligus Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat.

one vote–sekitar 1.026 suara saja dari anggota DMP (Dewan Musyawarah Pepera).

Interaksionisme Simbolik

Makna Dibalik simbol

Kaum fenomenologi memandang perilaku manusia sebagai produk dari cara orang tersebut menafsirkan dunianya (Bogdan & Taylor, 1975: 35). Artinya, interpretasi atas realitas temporer dan kontekstual tidak mungkin menjadi alat generalisasi. Interaksionis simbolis, cenderung setuju pada signifikansi kausal intrekasi sosial, jadi, makna tidak tumbuh dari proses mental soliter namun dari interaksi (Ritzer dan Goodman, 2009:394-395). Artinya, bukan bagaimana orang secara mental menciptakan makna dan simbol, namun makna dan simbol *hanya* akan tampak selama interaksi dan sosialisasi. Bagi Mead proses sosial muncul lebih dahulu dari pada struktur dan proses pengalaman individu. Pikiran bagi Mead, muncul dalam proses sosial dari komunikasi dan tidak bisa dipahami di luar konteks itu. Proses komunikasi terdiri dari dua fase: (1) percakapan *gestur*; dan (2) bahasa, atau percakapan *gestur* yang signifikan (Mead, 1934: 14-18).

Mead menekankan proses berpikir selalu dimulai oleh munculnya suatu masalah atau hambatan yang menghalangi tindakan individu. Hal ini merangsang untuk mencari jalan keluar yang bersifat tentatif terhadap masalah itu dalam hatinya. Orang tidak selalu rasional dalam berpikir dengan pemecahan alternatif atau dalam memilih alternatif yang paling efisien atau paling efektif. Salah satu faktor yang mengurangi rasionalitas, adalah tekanan untuk membuat atau memecahkan masalah dengan segera, sehingga mengurangi proses reflektif, dan cenderung untuk memilih cara yang tradisional (Johnson, 1990: 15).

Makna Tindakan (Action)

Mead mengemukakan dua model prilaku, yakni : (1) model *the act-as-such*, contonya aktivitas organik secara umum, dan (2) model *the social act*, sebagai aktivitas sosial, dimana persoalan khusus dari aktivitas organik dan hal ini adalah bagian relevan dalam interpretasi terhadap prilaku manusia. Hubungan antara proses sosial dari prilaku dan lingkungan sosial adalah analogis (Mead, 1934: 130):

Analisisnya terhadap *the act-as-such*, tentang prilaku sebagai terpengaruhi dari relasi antara individu dan lingkungan, karenanya realitas adalah bagian dari situasi relasi itu. Lanjutnya perilaku berkembang dalam empat tahap (Mead, 1938: 3-25), yakni: a). Tahap *impulse*, di mana individu organik merespon kepada situasi problematik dalam pengalamannya; b). Tahapan *perseption*, dimana individu mendefiniskan dan menganalisis masalah; c). Tahapan *manipulation*, dimana tindakan diambil dengan referensi persepsi - penilaian individu terhadap situasi persoalan; dan d). Tahapan *consummation*, dimana menemukan pemecahan dari kesulitan dan melanjutkan eksistensi organisme terbangun kembali.

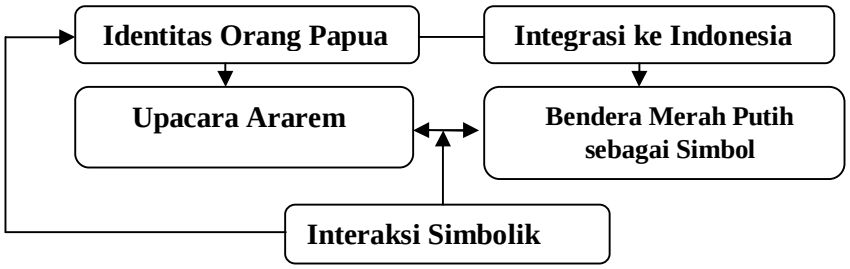
Analisisnya terhadap *the social act,* tentang prilaku sosial, dikatakan berakar dalam prilaku komunikasi signifikan, dalam kenyataanya, diatur oleh percakapan simbol signifikan, seperti yang dikatakan Mead (1934: 46*)*:

> *"The significant symbol functions here to indicate "some object or other within the field of social behavior, an object of common interest to all the individuals involved in the given social act thus directed toward or upon that object".*

Simbol signifikan dalam hal ini, yang dimaksud adalah penggunaan bendera Merah Putih dalam upacara *ararem*, maka pertanyaannya adalah apa yang hendak dikomunikasikan lewat simbol dan makna bendera itu oleh masyarakat Papua kepada khalayak Indonesia dan dunia?.

Kerangka Pikir Penelitian

Perkawinan bukan sebuah sumpah untuk menduduki jabatan tertentu dalam negara Indonesia, sehingga mengharuskan adanya simbol negara seperti bendera Merah Putih. Namun hal itu terjadi di Biak, Papua dan secara khusus menjadi fokus penelitian ini adalah desa Ambroben, Biak Kota.



3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme (Salim, 2006:71-72) dengan jenis penelitian deskriptif dan eksplanatori (Schulte Nordholt, 1973: 78; Suryabrata, 1983: 19; Sairin, 1995: 1). Penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan bendera Merah Putih dalam upacara *ararem,* sedangkan penelitian eksplanatori untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bendera Merah Putih dalam *ararem* itu. Proses pengambilan datanya dilakukan lewat wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi dan dokumentasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Sistem Kekerabatan Orang Biak

Kesatuan sosial orang Biak pada umumnya, termasuk orang Ambroben adalah *keret*, atau *klen*. Suatu *keret* terdiri dari sejumlah keluarga *batih* yang disebut *sim*. Wujud nyata dari kesatuan sosial tersebut pada waktu lalu adalah rumah besar yang disebut rumah *keret*. Rumah *keret* merupakan suatu bangunan yang berbentuk segi empat panjang dengan ukuran pajang kurang lebih 30-40 m, dan lebar 15 meter. Namun *keret* tidak hanya bermakna "rumah/bangunan" tetapi bermakna keluarga, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang mengatur kehidupan keluarga. Dalam konsepsi seperti ini, maka perkawinan bukan hanya merupakan keputusan dua orang (laki dan perempuan) namun merupakan keputusan *keret*.[5]

Dalam perkembangannya bentuk rumah *keret* seperti di atas sudah jarang ditemukan. Mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, maka masing-masing keluarga *batih, sim,* kemudian membangun rumah sendiri, namun tetap berkelompok menurut *keret*. Artinya sekalipun telah terpisah rumah, namun pertimbangan kekerabatan (*keret*) selalu menjadi utama, maka rumah-rumah yang berdekatan sudah pasti menunjukan kesamaan *keret*-nya. Namun terdapat pula beberapa *keret* berbeda bertempat tinggal saling berdekatan (dalam satu lokasi). Lokasi tempat dibangunnya dua atau lebih rumah *keret* yang berbeda itu disebut *mnu*. Pada awalnya satu *mnu* hanya didiami oleh satu *keret* saja, namun dalam perkembangan selanjutnya, misalnya melalui hubungan perkawinan dan perdagangan atau juga karena oleh bahaya perang yang sering terjadi antar penduduk, maka *keret-keret* dari tempat-tempat pemukiman yang berlainan tempat bergabung menetap pada

[5] Wawancara dengan Cosmas Rumabar (Kepala Adat Ambroben) tanggal 25 Juni 2015 di Rumahnya; Nico Rosumbre (kepala kampung Ambroben) tanggal 26 Juni 2015; Agustina Rumbewas (Kepala Distrik) 25 Juni 2015. Perlu dijelaskan bahwa kesatuan sosial dalam bentuk *Keret* ini berlaku secara umum pada masyarakat Papua.

tempat pemukiman dari *keret* tertentu. Sehingga terbangun *mnu* dengan *keret* yang berbeda.

Relasi kekerabatan *keret* dan *mnu* "dihitung" melalui garis keturunan laki-laki (bapak) atau bersifat patrilineal. Sedangkan tipe pokok kekerabatan yang dianut, yaitu, penggunaan istilah yang sama untuk penyebutan kerabat tertentu. Contohnya istilah "*naek"* digunakan untuk saudara-saudara kandung dengan saudara-saudara sepupu paralel, yaitu, anak-anak saudara laki-laki ayah, dan anak-anak dari saudara perempuan ibu. Seangkan sebutan "*napirem"* dikenakan pada saudara sepupu silang, yakni anak-anak dari saudara perempuan ayah dan anak-anak dari saudara laki-laki ibu. Semua saudara laki-laki ayah disebut dengan istilah *kma* (ayah), dan semua saudara perempuan ibu disebut *sna* (ibu), jadi satu orang anak memiliki beberapa ayah (bapak) dan beberapa ibu (mama). Sedangkan, semua saudara perempuan ayah disebut *mebin,* dan semua saudara laki-laki ibu disebut *me*[6].

Bentuk kekerabatan ini tampak terlihat jelas dalam proses perkawinan di Papua, khususnya di kampung Ambroben. Perkawinan dalam adat dan budaya ketimuran memang menjadi urusan keluarga besar (marga), tidak hanya urusan dua insan yang memutuskan untuk hidup bersama. Di Ambroben perkawinan merupakan tanggungjawab dua keluarga bahkan tanggungjawab dua *keret.* Dengan demikian, proses peminangan, pembayaran mas kawin dan upacara perkawinan (*ararem*) selalu dilakukan dalam bentuk pesta–yang melibatkan kerabat. Selain itu, setiap upacara perkawinan dilakukan dalam bentuk tari-tarian (*Yospan*) dari keluarga laki-laki menujuh rumah keluarga perempuan. Sejumlah orang banyak itu berjalan beriringan di jalan (raya), sambil bernyanyi dan menari, dan yang menarik adalah Bendera Merah Putih selalu digunakan.

[6] Mebin dan me, adalah sama dengan sebutan bibi dan paman di Jawa. Wawancara dengan Cosmas Rumabar (Kepala Adat Ambroben) tanggal 25 Juni 2015

b. Proses Peminangan, Pembayaran Mas Kawin (*Ararem*)

Adat perkawinan yang dianut oleh di Biak Numfor adalah *eksogami*, artinya antara anggota-anggota warga satu *keret* tidak boleh terjadi perkawinan. Dengan demikian isteri harus diambil dari *keret* lain, apakah *keret* lain itu berada pada *mnu* yang sama atau bukan. Selanjutnya pola perkawinan ideal menurut orang Ambroben, terutama pada waktu lampau, adalah perkawinan yang disebut *indadwer* yaitu pertukaran perempuan antara dua keluarga yang berasal dari dua *keret* yang berbeda. Bentuk perkawinan yang paling banyak terjadi adalah perkawinan melalui peminangan atau yang disebut *kakes* dan *fakfuken.*

Umumnya terdapat tiga kelompok dalam proses mengantar mas kawin (*ararem*), yakni ***Pertama,*** orang-orang yang dituakan dalam keluarga dan kerabat laki-laki, yang terdiri dari perempuan dan laki-laki. Mereka selalu berada dalam barisan paling depan, dengan menggunakan busana adat Biak, dan membawa *Ben Bepon* (piring tua) dan *Samfar* (uang/perhiasan). ***Kedua,*** terdiri dari kelompok campuran, laki-laki dan perempuan (kerabat namun bukan yang dituakan) yang dalam hal ini mereka bertindak sebagai pengantar. Mereka pun sama dengan kelompok pertama, tetapi harta/piring yang mereka pegang adalah piring- piring kecil (*ben*), guci, gelang *sarak,* termasuk juga *samfar* sebagai pelengkap harta dan jumlah yang ada; dan ***ketiga*****,** terdiri dari laki-laki dan perempuan tua maupun muda yang kehadiran mereka adalah sebagai kelompok musisi/kelompok penyanyi. Dalam barisan itu selalu ada dua atau tiga bendera Merah Putih, yang dibawa dalam barisan. Bendera itu berfungsi sebagai sahnya serah-terima *ararem*[7]*.*

Mengenai penggunaan bendera Merah Putih dalam upacara *ararem* tersebut, hampir semua informan (5 informan), mengutarakan alasan yang

[7] Wawancara dengan Elia Rumaropen (Tokoh Agama), tanggal 26 Juni 2015

sama. Seperti yang dikemukakan oleh Jemmy A. Awak, (tokoh Pemuda)[8], bahwa: "Bendera merah putih sudah dipakai sejak masuknya Papua ke Indonesia. Bendera itu adalah simbol negara republik Indonesia, digunakan dalam ritual atau upacara adat pembayaran mas kawin itu bertujuan sebagai perlindungan dan keamanan, alasannya supaya tidak diganggu oleh pihak yang mencurigai kegiatan yang pada saat itu situasi politik masih memanas". Walau demikian, para informan kunci juga mengungkapkan bahwa sebelum Papua bergabung menjadi bagian dari Indonesia, bendera yang digunakan adalah bendera Bintang Kejora. Bendera ini bermakna penghargaan dan penghormatan terhadap simbol negara Papua yang berdaulat.

c. Memaknai Bendera Merah Putih Dalam Prosesi Ararem

Sekilas Sejarah Integrasi Papua ke Indonesi

Sejak bangsa Papua Barat (Irian Barat) dimerdekakan oleh Belanda tanggal 1 Desember 1961, bendera Bintang Kejora dikibarkan di atas tanah Papua, dan masyarakat menyambutnya dengan sukacita akan simbol identitas sendiri. Implikasinya pemerintah Indonesia bereaksi keras dengan mengeluarkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) tanggal 19 Desember 1961– sembilanbelas hari setelah deklarasi kemerdekaan Papua–yakni: 1). Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda kolonial, 2). Kibarkan Merah Putih di Irian Barat, dan 3). Bersiaplah mobilisasi umum guna mempertahankan kesatuan tanah air dan negara (Yoman, 2015:37). Persengketaan ini kemudian melahirkan Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 yang disetujui bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun diduga perjanjian New York dilanggar karena PBB kemudian menyerahkan Papua ke pemerintah Indonesia tanggal 1 Mei 1963 sebelum Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969.

[8] Wawancara tanggal 27 Juni 2015, jam 09.00-09.30 WIT di rumahnya. Cosmas Rumabar (Kepala Adat Ambroben), wawancara tanggal 24 Juni 2015 di rumahnya.

Keinginan yang besar untuk mengintegrasikan Papua Barat ke Indonesia itu, mengakibatkan pelaksanaan PEPERA 1969 penuh dengan kecurangan. *Act of Free Choice* berubah makna menjadi *Act of No Choice* karena penduduk asli Papua yang berjumlah 800.000 jiwa tidak dilibatkan dalam PEPERA. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia memilih 1.025 orang untuk menyatakan setuju bergabung dengan Indonesia, bahkan dijelaskan oleh Socratez Sofyan Yoman (2015) bahwa sejak itulah (1960-an) setiap orang yang berbeda pandangan dengan Indonesia dibantai seperti hewan dengan kekuatan aparat militernya. Selain itu, Drooglever (2010:786-787) mengemukakan proses mengintegrasikan Papua ke dalam negara Indonesia tetap menjadi masalah, karena: a). Kesempatan bagi orang Papua untuk maju sangat terbatas; b). Penduduk Papua adalah kelompok yang paling miskin di Indonesia; c). Integrasi mental dan organisasional ke dalam negara Indonesia tidak tercapai, satu hal yang pasti adalah: Indonesia tidak berhasil memenangkan hati orang Papua. Hal ini diakibatkan kesadaran nasional orang-orang Papua meningkat dengan tajam, dengan disiplin mereka sendiri, para tokoh Papua dalam organisasi gereja maupun di masyarakat mampu mengelola keadaan ini sehingga kerusuhan dapat dicegah, bahkan mampu membawa suara orang Papua untuk didengar oleh pemerintah Indonesia dan dunia melalui cara yang terhormat namun tegas.

Dalam pikiran orang Papua keterpurukan demi keterpurukan yang mereka terima sejak tahun 1963 adalah akibat “politik salah urus” dan perilaku aparat keamanan yang main hakim sendiri. Realitas ini menunculkan dikotomi kulit hitam dan kulit putih. Mulanya orang Papua mengenal orang kulit putih melalui misionaris yang menyebarkan agama dan selalu berbuat baik, sedangkan orang kulit putih yang datang dan dikenal kemudian adalah orang Indonesia, dan mereka adalah militer yang datang untuk merebut dan mempertahankan Papua ke dalam NKRI dengan perilaku yang membuat rakyat menderita. Akibatnya muncul *stereotipe* pendatang kulit putih selalu baik bagaikan juru selamat adalah misionaris, sedangkan pendatang Indonesia (militer) selalu membawa bencana buat orang Papua.

Realitas kekecewaan orang Papua itu kemudian dirumuskan sebagai sebuah artikulasi politik Papua dalam Musyawarah Besar Papua (Mubes) tanggal 28 Februari 2000, yang dalam point 4 dirumuskan:

> *"Bahwa kami bangsa Papua setelah berintegrasi dengan Indonesia melalui pelaksanaan PEPERA yang tidak adil dan penuh kecurangan, dan setelah 36 tahun berada dalam Negara Republik Indonesia, bangsa Papua mengalami perlakukan-perlakuan keji dan tidak manusiawi, seperti: pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pembunuhan, pemerkosaan, pemiskinan, ketidakadilan sosial dan hukum yang mengarah kepada etnik dan kultur genoside bangsa Papua. Maka, kami atas dasar hal-hal tersebut menyatakan kehendak kami untuk memilih merdeka, memisahkan diri dari negara Republik Indonesia dan kembali ke status kami semula sebagai bangsa dan negara Papua, 1 Desember 1961, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh bangsa Papua kepada Presiden B.J. Habibie beserta para menteri Kabinet Reformasi Indonesia pada tanggal 26 februari 1999 di Istana Negara Jakarta".*

d. Daun, Bendera Bintang Kejora, Bendera Merah Putih: Simbol Pengesahan Ararem

Simbol merupakan objek sosial yang digunakan untuk merepresentasikan sesuatu yang disepakati. Dengan demikian, makna tidak tumbuh dari proses mental soliter namun dari interaksi (Ritzer dan Goodman, 2009:394-395), artinya, bukan bagaimana orang secara mental menciptakan makna dan simbol, namun makna dan simbol hanya akan tampak selama interaksi pada umumnya dan khususnya selama sosialisasi. Dalam praktek *ararem,* penggunaan "bendera" baik berupa daun, Bintang Kejora, maupun Merah Putih adalah simbol yang maknanya hanya akan ditemukan dalam proses *ararem* itu.

Dalam praktek *ararem* orang Papua khususnya di Biak memiliki pemahaman bahwa penyerahan dan penandatanganan *ararem* (mas kawin) memerlukan sebuah simbol pengesahan. Artinya ketika simbol (bendera: daun, Bintang Kejora, dan Merah Putih) dibawa serta dalam upacara itu, maka ada

pesan yang hendak disampaikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan bahwa mas kawinnya telah lengkap dan akan dibayar lunas. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Costan Rumabar (kepala Dewan Adat Ambroben) yang diwawancarai tanggal 24 Juni 2015 di rumahnya, bahwa: daun, Bintang Kejora, dan Merah Putih dalam praktek *ararem* dimaknai sebagai semacam "stempel" yang mengesahkan mas kawin. Namun demikian, ketiga "stempel" tersebut juga memiliki perbedaan makna.

Daun memiliki makna secara kultural, yang mengesahkan mas kawin; daun digunakan sebab "orang Pupua hidup menyatu dengan alam; alam dimaknai sebagai ibu kehidupan bagi mereka, daun untuk membuat atap rumah agar mereka dapat bertedu dari panas dan hujan", maka daun digunakan sebagai simbol alam–penyatuan keluarga (baru) dengan alam dan juga sebagai pelindung. Seperti yang dikatakan Mead bahwa proses berpikir selalu dimulai oleh munculnya suatu masalah, salah satunya dapat berupa tekanan untuk membuat atau memecahkan masalah dengan segera, sehingga mengurangi proses reflektif–atau kesempatan untuk mengidentifikasi dan menilai alternatif yang lebih baik, dan cenderung untuk memilih cara yang tradisional (Johnson, 1990: 15). Cara tradisional dalam konteks ini adalah penggunaan daun sebagai "stempel" sahnya *ararem,* dan kemudian berubah menjadi bendera: Bintang Kejora maupun Merah Putih.

Ketika kemerdekaan Papua dideklarasikan bersama-sama dengan bangsa Belanda, ada identitas baru yang mereka miliki, yakni sebagai sebuah bangsa merdeka; mereka perlu untuk mengekspresikan rasa nasionalisme (Papua) itu dalam tatanan kehidupan mereka. Proses berpikir sebagai konsekuensi kemerdekaan, maka daun digantikan dengan bendera Bintang Kejora. Bendera ini tidak hanya merepresentasikan identitas kultural orang Papua, namun sekaligus juga bermakna identitas politik orang Papua yang merdeka dan berdaulat. Mereka tidak lagi terkotak-kotak secara kultural berdasarkan suku bangsa, yang memang sangat banyak di pulau itu, namun menyatu dalam sebuah identitas politik-kultural yang diikat dengan simbol itu.

Dengan demikian, jika penggunaan daun dimaknai sebagai wadah yang dapat melindungi diri manusia dari kondisi panas dan hujan, karena dapat dijadikan atap rumah, maka bendera Binjang Kejora adalah simbol persatuan orang Papua yang sangat plural kesukuannya. Jadi Bendera Bintang Kejora secara politik bermakna penyatuan berbedaan kesuku-bangsaan dalam satu wadah besar yang bernama Papua Barat, maka orang Papua bercaya bahwa dibawa Bendera Bintang Kejora itu, mereka dapat hidup bersama dan melaksanakan kehendak mereka dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya orang Papua secara mandiri dan bermartabat. Maknanya dalam upacara *ararem* adalah sama sebagai "stempel" yang menyimbolkan sahnya upacara tersebut dan harga mas kawin siap untuk dibayar lunas.

Eforia ekspresi kemerdekaan dengan identitas simbolik bendera Bintang Kejora itu ternyata tidak bertahan lama. Seperti yang dikatakan Jimmy A. Awak S.Sos.,MA (Ketua KNPI Biak) yang diwawancarai tanggal 27 Juni 2015, bahwa: "dalam *ararem,* pernah ada bendera Bintang Kejora. Bintang Kejora digunakan sejak Papua menyatakan kemerdekaannya tahun 1961, tetapi sepertinya tidak lama dipakai karena waktu itu Papua merdeka tidak lama kemudian Indonesia masuk menginvasi Papua, jadi mungkin sebelum 1969 itu Bintang Kejora tidak lagi digunakan, karena kalau digunakan bisa ditembak sama tentara Indonesia". Pernyataan ketua KNPI Biak ini tentu benar adanya jika mempelajari sejarah masuknya Papua menjadi bagian dari NKRI. Sekalipun PEPERA baru terjadi tahun 1969, namun PBB telah menyerahkan kembali Papua ke pemerintah Indonesia tahun 1963. Karenanya, sejak tahun itu militer (orang kulit putih dari Indonesia) Indonesia sudah *bercokol* di Papua guna membantu mempersiapkan PEPERA.

Tahun 1969 benderah Merah Putih resmi berkibar dengan gagahnya di bumi Cerdrawasih. Sayangnya ketika Papua bergabung dengan Indonesia sang Proklamator yang mengusung TRIKORA bukan lagi Presiden RI–tidak ada lagi slogan "Bedikari" di Indonesia, maka tuduhan kekinian bahwa kepentingan Indonesia di Papua pasca 1969 adalah kepentingan ekonomi dan politik tidak dapat dengan mudah dibantah. Apapun itu Garuda telah mencengkram

kukunya begitu dalam terhadap Papua. Lalu pertanyaannya apa makanya Merah Putih itu dalam upacara penyerahan mas kawin (*ararem*) oleh masyarakat Biak?.

Pada intinya semua informan kunci memiliki jawaban yang sama bahwa Bendera Merah Putih memiliki makna yang sama dengan simbol "Bintang Kejora" sama-sama sebagai simbol persatuan, lambang negara yang perlu dihargai dan dihormati. Artinya sekalipun ada kecurangan dalam PEPERA, namun Papua telah menjadi bagian dari Indonesia maka bendera Merah Putih harus dihargai. Jimmy A. Awak S.Sos.,MA (Ketua KNPI Biak), tanggal 27 Juni 2015 menjelaskan bahwa: "Bendera Merah Putih sudah dipakai sejak masuknya Papua ke Indonesia, karenanya sudah menyatu dengan adat, juga mempunyai nilai-nilai tertentu dalam perkawinan adat Biak. Maka, setiap kali diadakan pesta adat perkawinan selalu harus ada bendera Merah Putih untuk ditukar kepada pihak keluarga perempuan yang hendak dikawini oleh keluarga pihak laki-laki, dan bendera ini tidak saja sebagai alat tukar namun harus dibeli dan dibayar oleh pihak keluarga perempuan dengan uang. Pengantaran mas kawin tidak akan berjalan jika bendera Merah Putih belum dibawa serta, karena bendera ini mempunyai nilai dan peranan penting yang menyatukan orang Papua dan Indonesia.

The act-as-such secara fundamental terkarakter oleh relasi antara individu organik dengan lingkungan atau dunianya, menjadi satu dan menjadikan hubungan antara individu dan dunianya terdefinisi dan terbangun (Mead, 1938: 215). Realitas integrasi Papua ke Indonesia itulah yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak orang Papua untuk mendefinisikan dunianya sebagai orang Indonesia yang cinta akan bendera Merah Putih. Setidaknya itulah realitas yang menampakan diri dari pelaksanaan *ararem.* Namun realitas tentu tidak tunggal, di satu sisi integrasi telah terjadi dan bendera Merah Putih memang harus digunakan untuk menggantikan posisi Bintang Kejora dalam *ararem,* di sisi lain pergantian itu adalah wajar, sewajar ketika "daun" digantikan posisinya oleh bendera Bintang Kejora. Jadi pergantian itu merupakan tradisi yang biasa saja, yang luar biasa adalah

kondisi awal yang mendasari cara pikir dan mengakibatkan pergantian posisi itu dan implikasinya.

Dalam konteks itu empat tahap perkembangan perilaku yang dikemukakan Mead menjadi bermakna, yakni: 1). *Impulse*, dalam konteks ini, respon masyarakat Biak kepada realitas integrasi Papua ke Indonesia itu terdapat situasi problematik, yakni pemerintah Indonesia lewat kekuatan militernya telah memaksa, mengintimidasi orang Papua untuk bergabung dengan Indonesia. Dikatakan memaksa dan mengintimidasi karena proses PEPERA dilakukan dengan tidak adil dan penuh kecurangan, militer mencurigai masyarakat ketika berkumpul atau mengelompokan diri dalam melakukan sebuah kegiatan, padahal inti dari upacara *ararem* menghendaki pesta dan arak-arakan di jalan menuju rumah pihak perempuan. Tahap *impulse* ini menggiring orang Papua untuk; 2). *Perseption of reality*, mereka mendefinisikan dan menganalisis realitas sebelum dan sesudah menjadi Indonesia. Hasilnya adalah realitas sebelum integrasi yang damai, aman, merdeka, berdaulat dan bermartabat itu diciderai oleh perilaku militer (orang kulit putih) Indonesia, berupa intimidasi, penangkapan, pemerkosaan, pembunuhan, perampasan hak, perampasan kemerdekaan, kecurigaan yang berlebihan tentang praktek adat yang menghendaki pesta, dan lain sebagainya. Hasil dari skema persepsi (penilaian) terhadap realitas itu menuntun mereka untuk melakukan; 3). *Manipulation* terhadap realitas dunia mereka. Manipulasi ini tanpak dalam pergantian posisi bendera Bintang Kejora ke bendera Merah Putih, simbol negara Indonesia itu dinilai memiliki kekuatan simbolik yang dapat menjaga dan menyelamatkan mereka (orang Biak) ketika melakukan upacara *ararem*, berkelompok dan berpesta di ruang publik–arak-arakan di jalan raya. Manipulasi itu dilakukan agar mereka bisa terhindar dan teror bahkan pembunuhan oleh militer Indonesia karena dicurigai makar. Keamanan dan keselamatan diri dan kolektif itulah harapan mereka, itulah yang dalam konsepsi Mead disebut tahap *consummation*–sebagai tahap terakhir. Artinya lewat penggunaan bendera Merah Putih dalam *ararem* mereka menemukan pemecahan dari kesulitan dan melanjutkan eksistensi mereka kembali kepada

kondisi aman dan kondusif, seperti ketika mereka belum bergabung ke Indonesia.

Sekalipun demikian, jika hanya mendasarkan diri pada tindakan analog perilaku alami sebagai model "perilaku biologis individu" seperti di atas, tidak akan tepat untuk menganalisis perilaku sosial (*social act*). Hal ini dikarenakan, organisme sosial bukanlah individu organis, tetapi "sebuah kumpulan sosial dari organisme individu" (Mead, 1934: 130). Individu manusia, adalah anggota dari organisme sosial, dan tindakannya harus dilihat dalam konteks prilaku sosial yang mencakup individu-individu yang lain. Masyarakat bukanlah sekumpulan *preexisting atomic individuals*–dari diri independen yang belum pernah ada, tetapi sebagai sebuah kesatuan proses dimana individu mendefinisikan dirinya melalui partisipasi dalam prilaku sosial. Dalam konteks inilah Bendera Merah Putih menjadi basis tindakan kolektif dalam upacara *ararem* itu menjadi berarti.

Hal itu senada dengan yang dikatakan Agustina Rumbewas (Kepala Distrik Biak Kota) yang diwawancarai tanggal 25 Juni, bahwa: "Bendera Merah Putih adalah lambang negara yang sudah pasti harus di hargai dan dihormati oleh kami sebagai orang Papua, itu adalah milik kami juga. Kami sudah memakai bendera Merah Putih dalam *ararem* sejak Papua bergabung ke NKRI, alasan dipakai untuk keamaan kelompok atau rombongan yang mengantar maskawin sehingga tidak diganggu oleh pihak lain terutama militer. Untuk itu pada saat pembayaran maskawin tidak ada keamanan (tentara) yang ikut mengawal acara tersebut, cukup ada bendera Merah Putih dipegang oleh beberapa orang, apabila ada pihak yang mengganggu maka akan ditindak dianggap bahwa tidak menghormati dan menghargai bendera yang dibawa oleh rombongan tersebut, tetapi kalau tidak bawa bendera bisa-bisa kelompok itu *dihajar* aparat, karena dicurigai melakukan mobilisasi masa untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya mau merdeka. Militer itu selalu curiga, mereka pikir kami ini bukan orang baik-baik".

Ketika peneliti menanyakan maksud tentang "ketika ada kelompok yang mengganggu" itu dengan berat hati beliau berkata "begini anak[9], *kitorang* ini stress juga mau jadi orang Indonesia yang baik susah, mau jadi orang Papua yang baik juga susah. *Kitorang* yang hidup baik-baik tidak ikut gerakan merdeka itu dicurigai oleh mereka yang berjuang untuk "M" itu sebagai pro Indonesia, tapi juga dicurigai oleh tentara kalau *kitorang* berkumpul banyak-banyak (orang) untuk buat acara seperti *ararem* itu. Jadi bendera itu supaya tentara *tau kitorang* tidak buat gerakan tambahan". Hal ini berarti, jika *ararem* tanpa membawa bendera Merah Putih akan dicurigai Tentara (militer), namun kalau membawa bendera Merah Putih mereka juga takut terhadap gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka), jadi memang kebebasan untuk berserikat menjadi masalah serius yang dihadapi oleh orang Papua "yang hidup baik-baik itu". Namun mereka memilih untuk menggunakan bendera Merah Putih karena lebih takut terhadap Tentara ketimbang OPM, bagi mereka orang-orang OPM sekalipun memiliki perbedaan pandangan, namun mereka masih saudara–sesama orang Papua yang bercirikan "hitam kulit keriting rambut". Frasa "hitam kulit keriting rambut" ini menjadi ciri pembeda antara penduduk asli dan pendatang, bahwa pendatang itu selalu "putih kulit dan lurus rambut".

Berdasarkan analisis di atas, disimpulkan bahwa makna Bendera Merah Putih dalam upacara *ararem* adalah selain sebagai tradisi penghargaan terhadap simbol negara, namun yang lebih penting adalah bermakna: ekspresi rasa takut, pertahanan diri, serta perlindungan dan keamanan. Makna ini sekaligus menjadi faktor pengaruh yang akan dianalisis lebih lanjut pada bagian berikut.

[9] Kata "anak" di Papua adalah ungkapan sayang dari orang yang lebih tua bagi mereka yang lebih mudah umurnya. Jadi dalam interaksi, kata ini tidak selalu bermakna anak kandung, tetapi juga bermakna kekeluargaan secara luas.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Bendera Merah Putih

Faktor Tradisi

Tradisi dalam hal ini dimaknai sebagai kelangsungan masa lalu di masa kini, atau tidak anya soal fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Kelangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk: material dan gagasan, atau subjektif dan objektif. Atau dengan kata lain, tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang, atau dilupakan (Sztompka, 2008:71-72). Jadi penggunaan bendera Merah Putih adalah tradisi yang biasa-biasa saja.

Tradisi itulah yang menuntun gagasan orang Papua tentang sesuatu (simbol atau tanda) yang berfungsi mengesahkan proses *ararem* itulah yang diwariskan atau menjadi tradisi sampai sekarang. Gagasan itulah yang termanivestasi dalam bentuk "daun" yang kemudian terwariskan, namun dalam perkembangannya berubah menjadi Bendera Bintang Kejora sebagai konsekuensi kemerdekaannya oleh Belanda. Maka, tradisi "daun" kultural dalam konteks suku bangsa berubah menjadi tradisi Bendera Bintang Kejora yang bermakna politik penyatuan orang Papua sebagai satu bangsa yang berdaulat. Kemudian berubah lagi ketika bangsa ini bergabung dengan negara Indonesia, maka bendera Merah Putih dipilih menggantikan Bintang Kejora dalam pelaksanaan *ararem.* Sekalipun demikian, perubahan tradisi Bintang Kejora ke tradisi Merah Putih tidak linear dalam pemaknaannya sebagai simbol politik penyatuan orang Papua ke Indonesia saja, namun bendera Merah Putih juga diberi makna lain atau tambahan, seperti yang telah dijelaskanpada bagian awal. Penambahan makna ini tentu dilatari oleh sejarah masa lalu orang Papua bahkan sampai sekarang yang diperlakukan secara tidak adil.

Dengan demikian, faktor tradisi ini sebenarnya faktor yang biasa saja, yang luar biasa adalah gagasan tentang makan yang mengikuti perubahan

simbol itu. Dari "daun" ke bendera Bintang Kejora" gagasan perubahan itu adalah juga biasa saja, namun dari Bintang Kejora ke bendera Merah Putih menjadi luar biasa, sebab terdapat gagasan sakit hati, penderitaan, ketakutan, pertahanan diri, dan perlindungan serta keamanan yang menyertainya. Pertannyaanya orang Papua takut, sakit hati, menderita, dan lain-lain kepada siapa? Jawabannya adalah kepada orang kulit putih yang berasal dari Indonesia, dan mereka utamanya adalah militer.

Faktor Ketakutan dan Pertahanan Diri

Sejarah kelam masa lalu (1960-an) merupakan pelajaran berharga bagi orang Papua di Ambroben, Biak Kota, untuk memersepsi dunia kehidupan mereka. Papua yang dijadikan wilayah DOM (Daerah Opersi Militer) dalam waktu yang lama juga menjadi pertimbangan sendiri bagi orang Papua dalam melakukan aktivitasnya di ruang publik. *Yospan* (Yosim Pancar) adalah tari dan lagu yang dalam budaya Papua biasanya juga ditarikan di jalan-jalan raya– tempat umum yang merangsang keinginan siapapun untuk ikut berdendang bersama (pesta rakyat), dan ini membuat orang untuk mendekat, berkumpul, ikut menari atau bahkan hanya menonton.

Dalam pelaksanaan *ararem*, Yosim Pancar menjadi tarian (tradisi) yang tidak mungkin dihilangkan dalam arak-arakan menuju rumah pihak perempuan. Di sini, alam pikir tentang kecurigaan militer, larangan berkumpul dan berserikat akibat DOM menjadi bahan pertimbangan bagi mereka. Ada situasi mencekam yang melahirkan ketakutan bagi mereka (orang Papua) yang hendak melakukan upacara pembayaran mas kawin (*araremi*), ketakutan itu berkaitan dengan kecurigaan mereka terhadap militer, atau sebaliknya kecurigaan militer kepada mereka. "Hitam kulit keriting rambut" mungkin menjadi faktor penentu mengapa mereka yang melakukan *ararem* atau aktivitas apapun yang mensyaratkan orang berkumpul dicurigai oleh aparat. Hal ini dikarenakan, saudara mereka yang bergerak untuk merdeka di hutan-hutan juga memiliki slogan yang sama, yakni "hitam kulit keriting rambut".

Karenanya, untuk dapat mempertahankan diri dan kelompok, maka perlu menghadirkan suatu tanda dan yang dipilih adalah bendera Mereka Putih. Artinya bendera Merah Putih dalam konteks ini bermakna mengurangi ketakutan wagra Papua terhadap kecurigaan militer akan aktivitasnya, juga bermakna pertahanan diri dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, yang mungkin dilakukan militer kepada mereka. Dengan membawa bendera Merah Putih, mereka hendak memberi pesan kepada orang lain terutama tentara (militer) bahwa mereka juga adalah pemilik sah negara ini, dan karena itu tidak perlu selalu dicurigai.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Elia Rumaropen (Tokoh Agama Ambroben) yang diwawancarai tanggal 26 Juni 2015, yang pada intinya mengatakan bahwa: "Bendera merah putih digunakan untuk perlindungan dan pertahanan diri dari kecurigaan-kecurigaan tentara (militer) karena pada saat itu terjadi gejolak politik di mana masyarakat Papua masih bersuara tentang kemerdekaan, maka untuk tidak diganggu dan dicurigai maka bendera Merah Putih digunakan dalam dalam prosesi *ararem* ini agar berjalan lancar. Mereka takut kalau tidak bawa bendera Merah Putih nanti dituduh macam-macam, baik kalau cuma dituduh kalau langsung ditangkap, dipukul, dipenjarakan atau ditembak ditempatkan bisa bahaya. Jadi supaya mengurangi rasa takut mereka bawa bendera, itu tanda pertahanan diri dan kelompok yang ikut *ararem".*

Pertanyaannya adalah segenting itukah realitas politik di Papua khususnya di Biak, sehingga militer begitu serius mengarahkan perhatian mereka kepada setiap aktivitas adat? bahkan hanya untuk sekedar membayar mas kawin masih diperhatikan? Atau memang militer kita lagi kurang kerjaan? Mungkin hanya Tuhan dan Gus Dur yang bisa menjawab. Setidaknya Gus Dur pernah mengembalikan kehormatan orang Irian Jaya dengan mengizinkan penggunaan nama Papua untuk wilayah ini, serta mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora, ketika dia menjadi Presiden RI.

Faktor Perlindungan dan Keamanan

Negara (Republik Indonesia) memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itulah amanat Pembukaan UUD 1945 ketika negara ini dibentuk. Tugas mulia negara ini perlu diarahkan untuk melindungi dan menjaga kehormatan setiap warga negara dengan seluruh perangkat budaya yang dimilikinya. Dan tugas mulia itu dalam perspektif negara dijalankan oleh Presiden dengan dibantu olah alat negara–dalam hal ini yang memiliki *tupoksi* itu adalah militer. Dalam realitas seperti itu, pertanyaan yang mengemuka adalah "dalam praktek *ararem* di Biak, kelompok yang melaksanakan upacara adat ini ingin mengamankan diri dari apa/siapa? Atau ingin melindungi diri dari apa/siapa?" Hasil penelitian membuktikan bahwa mereka hendak memohon perlindungan dari negara (Presiden) lewat penggunaan simbolis bendera Merah Putih dalam upacara adat. Dengan demikian, orang Papua lebih percaya pada kekuatan simbol itu ketimbang kekuatan tentara atau militer Indonesia. Dengan bendera Merah Putih mereka hendak melindungi diri dari militer bukan meminta militer untuk menjaga proses itu, namun cukup dengan bendera saja. Praktek itu memberi kesan bahwa mereka memang tidak percaya kepada militer (tentara).

Hal demikian senada dengan yang dikatakan Costan Rumabar (kepala Adat Abroben), bahwa: "Bendera Merah Putih dipakai dalam upacara perkawinan, karena siapapun yang memakai Bintang Kejora dianggap melawan atau separatis maka untuk menjaga agar upacara pembayaran maskawin ini lancar dari kecurigaan militer Indonesia digunakanlah bendera Merah Putih, jadi alasan mendasarnya untuk perlindungan dan keamanan prosesi *ararem*".

Aparat keamanan (Polisi dan Tentara) yang sejatinya adalah alat negara, harus mengarahkan seluruh potensi yang mereka miliki untuk melindungi, menjaga keamanan dan kenyamanan setiap warga negara, bukan hanya

melindungi mereka yang berafiliasi dengan kepentingan-kepentingan bisnis dan birokrasi tertentu. Tugas perlindungan dan keamanan itu perlu dilandasi dengan semangat saling percaya dan bukan mencurigai aktivitas warga masyarakat, apalagi aktivitas adat. Beban psikologis yang (mungkin) diakibatkan oleh perilaku aparat yang hanya berpihak pada kepentingan penguasa dan bisnis ini hanya akan menambah luka lama yang dirasakan oleh orang Papua sejak dulu. Atau meminjam kata-kata Ebid G. Ade dalam sebuah syairnya "...menggores luka baru di atas luka lama..." jika ini yang terus terjadi, maka penjelasan Drooglever (2010:786-787) bahwa sejak proses integrasi Papua sampai saat ini "...Indonesia tidak berhasil memenangkan hati orang Papua..." menjadi semakin bermakna.

5. KESIMPULAN dan REKOMENDASI

Penggunaan bendera Merah Putih dalam upacara *ararem* memiliki persamaan sekaligus perbedaan makna dengan dua simbol yang digunakan sebelumnya, yakni: simbol daun dan bendera Bintang Kejora. *Pertama*, bahwa bendera Merah Putih dimaknai sebagai "stempel" berfungsi mengesahkan mas kawin yang diantar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sebelum penandatanganan "berita acara" penyerahan. *Kedua,* bendera Merah Putih sebagai pemberi "pesan" dan "alat ukur" kepada masyarakat yang melihat dan mengikuti upacara *ararem* bahkan bagi pihak perempuan bahwa pihak laki-laki telah siap membayar lunas mas kawin yang diminta. Jadi makna mendalamnya adalah sebagai "alat tukar" dan tanda serah terima mas kawin. Dikatakan sebagai "alat tukar" sebab pihak perempuan sebelum mengambil bendera tersebut harus membayar terlebih dahulu. Keduanya dikategorikan sebagai makna tradisi. *Ketiga,* bermakna penghargaan dan penghormatan terhadap identitas baru, yakni menjadi Indonesia. *Keempat,* bermakna ekspresi ketakutan dan pertahanan diri. *Kelima,* bermakna perlindungan dan keamanan. Realitas ini sekaligus juga mengindikasikan bahwa orang Papua khususnya di

Biak lebih percaya kepada bendera Merah Putih ketimbang percaya kepada militer dan polisi Indonesia.

Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bendera Merah Putih adalah: a). Faktor tradisi, yakni karena gagasan yang diwariskan tentang adanya simbol/tanda yang berfungsi untuk mengesahkan, menjadi alat tukar, dan pemberi pesan tentang mas kawin, maka bendera Merah Putih gunakan setelah Papua diintegrasikan ke Indonesia; b). Faktor ketakutan dan pertahanan diri, yakni bendera merah putih oleh mereka dianggap mampu memberi mereka keberanian untuk beraktifitas di ruang publik dan sekaligus menjaga keselamatan jiwa dan raga individu serta kelompok yang mengikuti *ararem*; dan c). faktor perlindungan dan keamanan, yakni bendera Merah Putih diyakini mampu melindungi dan menjaga keamanan diri, kelompok dan lingkungan dari kebringasan aparat keamanan yang selalu curiga terhadap aktivitas mereka.

Rekomendasi

Kepada pemerintah, disarankan untuk lebih melakukan pendekatan secara kultural kepada masyarakat Papua khususnya di Biak. Bahwa penggunaan bendera Merah Putih dalam upacara *ararem* adalah hal yang baik untuk ditingkatkan, namun perlu dirumuskan nilai-nilai nasionalisme Indonesia bagi orang Papua agar tidak terjebak dalam pola pikir mereka yang (terlanjur) negatif terhadap Indonesia.

Kepada aparat keamanan (polisi dan militer) untuk tidak selalu melihat dan menilai sesuatu (apalagi ritual adat) dengan pendekatan keamanan yang berujung kekerasan. Aparat keamanan perlu menumbuhakan dalam diri mereka rasa percaya kepada orang Papau, dan menghindari rasa curiga yang berlebihan. Rasa percaya itu akan membangkitkan rasa percaya diri, kebersamaan dan solidaritas orang Papua bahwa mereka adalah juga pemilik sah negara ini.

Kepada masyarakat Ambroben Biak disarankan agar praktek penggunaan bendera Merah Putih yang telah mentradisi ini perlu dipertahankan, namun bagi orang Tua (tokoh masyarakat dan tokoh agama) perlu menjelaskan dan mengajarkan kepada generasi muda bahwa praktek budaya yang dilakukan adalah ungkupan nasionalisme Indonesia sejati yang disumbangkan orang Papua kepada Indonesia.

Kepada mereka yang ingin melakukan penelitian berkaitan dengan topik ini, disarankan untuk lebih fokus pada: a). Nasionalisme Indonesia dalam pandangan orang Biak; b). Merah Putih sebagai simbol Perkawinan Indonesia Papua; c). Kontradiksi penggunaan bendera Merah Putih dalam proses *ararem* dan upaya perjuaangan kemerdekaan Papua; dan d). topik lain yang bisa dirumuskan sendiri ketika membaca hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alua, Agus A, *Papua Barat Dari Pangkuan ke Pangkuan : Suatu Ikhtisar Kronologis, Jayapura : Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur Jayapura*, 2006.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* : *Aktualisasi Motodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.

Bogdan, Robert & Taylor, Steven J. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Science*. New York: John Wiley & Sons, 1975

Cronk, George. *"George Herbert Mead"* Internet Encyclopedia of Philosophy, 2005 .

Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Ihalauw, John J.O.I. *Bangunan Teori. Edisi 3 Milenium.* Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2003.

Johnson, Paul Doyle. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta. Gramedia, 1990.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan.* Jakarta: Gramedia, 1974.

Mead, George Herbert. *Mind, Self, and Society*, ed. C.W. Morris. Chicago: University of Chicago, 1934.

_____. *The Philosophy of the Act*, ed. C.W. Morris. Chicago: University of Chicago, 1938.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2004.

Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Olson, David H & Detrait John. *Marriages and Families : intimacy, diversity and strengths*, Boston: McGraw Hill, 2006.

Ritzer, George dan Goodman, J. Douglas. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Posmodern.* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.

Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Sairin S. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Pusat Pendidikan Kependudukan UGM, 1995.

Schulte Nordholt, Nico. *Metodologi dan Metodik Sosiologi*. Salatiga: LPIS UKSW, 1973.

Siregar, Latifah Anum. "Konflik Separatis di Papua" dalam *Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia.* Yogyakarta: Center for Security and Peace Studies (SCPS), Universitas Gadjah Mada, 2004.

Surbakti, E.B. *Sudah Siapkah Menikah*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008.

Suryabrata. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial.* Jakarta: Prenada Media Group, 2004.

Ubaedillah, A. & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Walgito, B. *Bimbingan dan Konseling Pernikahan,* Yogyakarta: Andi, 2002

Widjojo, Muridan S., Dilema dan Refleksi Ot-Sus dalam buku Lamadi de Lamanto, *Bola Liar Kegagalan Ot-Sus, Esai-Esai Kritis Perubahan dan Demokratisasi Lokal di Tanah Papua*, La-Keda Institute, 2009.

Yoman, Sofyan, Socratez. *Kami Berdiri Di Sini: Status Politik dan Sejarah Integrasi adalah Akar Masalah Papua.* Jayapura: ETM Press, 2015.